CASCADING BADAN PENDAPATAN DAERAH

VISI

NGANJUK MAJU ADIL DAN SEJAHTERA

MISI 4

MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS, BERLANDASKAN HUKUM YANG DIDUKUNG OLEH PROFESIONALISME APARATUR,

TUJUAN RPJMD

"NGANJUK AKUNTABEL".

MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK

SASARAN RPJMD

MENINGKATKAN BIROKRASI YANG AKUNTABEL DAN EFEKTIF, SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

STRATEGI RPJMD

MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

ARAH KEBIJAKAN RPJMD

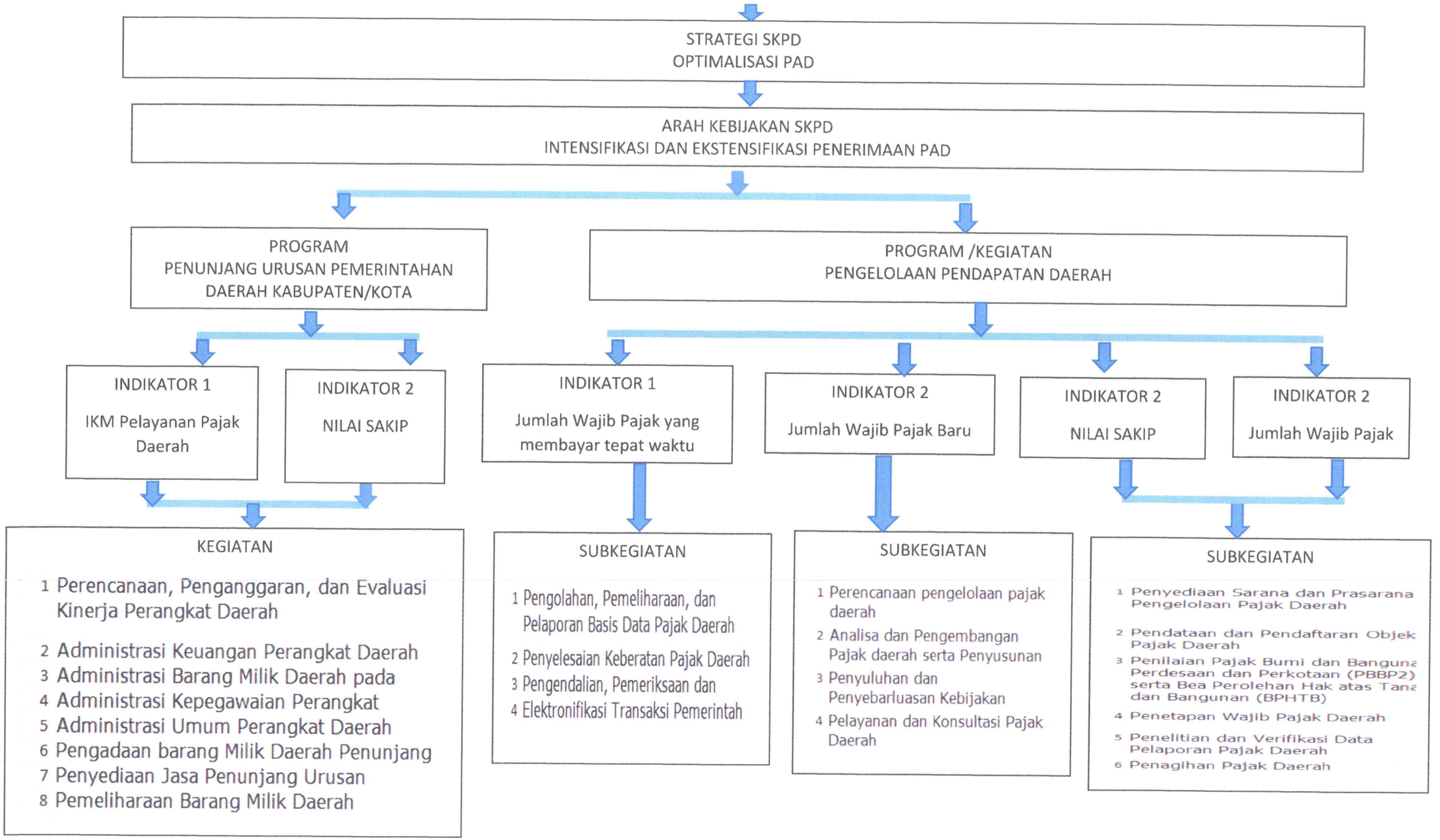
PENCIPTAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD AND CLEAN GOVERNMENT) SERTA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YAN BAIK (GOOD GOVERNANCE) BERBASIS ELEKTRONIFIKASI (E-GOVERNMENT)

TUJUAN SKPD

MENINGKATNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN

SASARAN SKPD

MENINGKATNYA PENGELOLAAN PENDAPATPENDAPATAN ASLI DAERAHAN


STRATEGI SKPD
OPTIMALISASI PAD
ARAH KEBIJAKAN SKPD
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENERIMAAN PAD
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM /KEGIATAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
INDIKATOR 1
IKM Pelayanan Pajak Daerah
INDIKATOR 2
NILAI SAKIP
INDIKATOR 1
Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat waktu
INDIKATOR 2
Jumlah Wajib Pajak Baru
INDIKATOR 2
NILAI SAKIP
INDIKATOR 2
Jumlah Wajib Pajak
KEGIATAN
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3 Administrasi Barang Milik Daerah pada
4 Administrasi Kepegawaian Perangkat
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
6 Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang
7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
SUBKEGIATAN
1 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
2 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
3 Pengendalian, Pemeriksaan dan
4 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
SUBKEGIATAN
1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah
2 Analisa dan Pengembangan Pajak daerah serta Penyusunan
3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan
4 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
SUBKEGIATAN
1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
2 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
3 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunz Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanz dan Bangunan (BPHTB)
4 Penetapan Wajib Pajak Daerah
5 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
6 Penagihan Pajak Daerah